

## NASKAH PUBLIKASI

**KOLABORASI PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT  
DALAM PENGELOLAAN OBYEK WISATA ALAM POSONG DI  
DESA TLAHAP KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN  
TEMANGGUNG TAHUN 2019**

Oleh:

YUSRIM MUSA

20160520048

Telah di setuju dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah penulisan karya ilmiah

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.**

NIK: 19660828199403163 025

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Dan Ilmu Politik**

**Dr. Titin Purwaningsih, S.IP.,M.Si.**

NIDN: 0522086901

**Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan**

**Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.**

NIDN: 0528086601

# **COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN OBYEK WISATA ALAM POSONG DI DESA TLAHAP TAHUN 2019**

**Yusrim Musa,**

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Email : [osengtempe.14@gmail.com](mailto:osengtempe.14@gmail.com)

**Muchamad Zaenuri**

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Email : muchamadzaenuri@umy.ac.id

## **ABSTRAK**

Salah satu fakta masalah yang ada adalah Kabupaten Temanggung berada diantara dua Kabupaten yang memiliki potensi wisatanya lebih dikenal orang, khususnya turis asing. Terutama Candi Borobudhur (Kabupaten Magelang) dan dataran tinggi Dieng (Kabupaten Wonosobo) sehingga Kabupaten Temanggung di sini posisinya sebagai daerah transit atau daerah ampunan atau Daerah Antar Tujuan Wisata (DATW), belum sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW). Adapun perbandingan jumlah wisatawan dari ketiga kabupaten, Kabupaten Wonosobo sebesar 1.099.432 wisatawan, Kabupaten Magelang 5.402.084 wisatawan dan Kabupaten Temanggung sekitar 30.000 wisatawan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 7 orang yang terdiri dari, 1 kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, 1 Kepala Desa Tlahab, 1 orang Kepala Dusun, 1 orang pemilik Taman Wisata Alam Posong, 1 orang perwakilan dari BUMDES, 1 orang perwakilan dari Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), 1 orang perwakilan dari masyarakat Desa Tlahab.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang dilakukan oleh para stakeholder dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong sudah berjalan dengan baik. Namun adapun kekurangan dari proses collaborative governance dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong, yaitu belum dibentuknya regulasi yang mengatur dari collaborative governance ini.

**Kata Kunci:** *Collaborative Governance*, tata kelola obyek wisata, Desa Tlahap

## **I. PENDAHULUAN**

Dengan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, mengapa pariwisata Indonesia dalam realitanya ternyata tertinggal dari Thailand, Singapura dan Malaysia. Ketertinggalan ini dapat dilihat dari jumlah devisa yang diperoleh ketiga negara tersebut dan jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi obyek-obyek wisata di ketiga negara ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang diperoleh Indonesia. Sebenarnya Pemerintah Indonesia sudah lama menyadari bahwa sektor pariwisata dapat diandalkan untuk menjadi salah satu sumber penerimaan resmi negara ini. Selain itu, selama ini Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya untuk memajukan dunia pariwisata Indonesia, salah satunya dengan meningkatkan pengelolaan obyek wisata dengan melibatkan atau mengajak pihak-pihak di luar pemerintahan. .(Studi et al. 2016)

Keterlibatan pemerintah, masyarakat maupun swasta dalam mengelola suatu potensi pariwisata yang dimiliki oleh suatu daerah, para pakar sering menyebutnya dengan istilah *collaborative governance*. *Collaborative governance* sendiri dapat didefinisikan sebagai bentuk baru dari proses tata kelola yang melibatkan semua pemangku kepentingan yang berbeda dalam hubungan kerja satu sama lain melalui dialog rutin dan interkasi dalam mengejar tujuan bersama.

Salah satu sektor publik yang sangat potensial jika dalam pengelolaannya dilakukan menggunakan metode *Collaborative governance* yaitu adalah sektor Pariwisata. Karena jika sektor pariwisata dalam pengembangan dan pemeliharaan dilakukan secara baik dan maksimal, maka sektor ini akan mengakibatkan pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu kolaborasi yang dilakukan pemerintah , masyarakat dan swasta (*stakeholders*) di bidang pariwisata diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, karena sektor pariwisata merupakan salah satu sektor nonmigas yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian negara. Usaha mengembangkan dunia pariwisata ini didukung dengan UU No 10 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa keberadaan 3 objek wisata pada suatu daerah sangat menguntungkan, antara lain meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan taraf hidup masyarakat dan memperluas kesempatan kerja, mengingat semakin

banyaknya pengangguran saat ini, meningkatkan rasa cinta lingkungan serta melestarikan alam dan budaya setempat.

Kabupaten Temanggung sendiri memiliki khazanah pariwisata yang lengkap, mulai dari wisata alam, wisata pegunungan pendakian, wisata budaya, wisata buatan dan desa wisata. Potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Temanggung diantaranya adalah Wana Wisata Umbul Jumprit, Situs Liyangan , Rest Area Kledung, dan Obyek Wisata Alam Posong. Salah satu fakta masalah yang ada adalah Kabupaten Temanggung berada diantara dua Kabupaten yang memiliki potensi wisatanya lebih dikenal orang, khususnya turis asing. Terutama Candi Borobudhur (Kabupaten Magelang) dan dataran tinggi Dieng (Kabupaten Wonosobo) sehingga Kabupten Temanggung di sini posisinya sebagai daerah transit atau daerah ampiran atau Daerah Antar Tujuan Wisata (DATW), belum sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW).

Penyebaran destinasi wisata di wilayah Kabupaten Temanggung tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang seringkali terjadi dalam industri pariwisata antara lain: Pertama, masih banyaknya destinasi yang (a) belum siap bersaing dipasar global, disebabkan belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata; (b) belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pariwisata; (c) belum optimalnya kemitraan dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, (d) belum optimalnya kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi dibidang pariwisata; Kedua, belum efektifnya pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata. Ketiga, terbatasnya daya saing sumber daya pariwisata seperti terbatasnya jumlah, jenis, dan kualitas SDM.

Salah satu tempat wisata yang masih terbilang baru dan sedang naik daun dikalangan milenial di daerah Kabupaten Temanggung dan sekitarnya adalah Objek Wisata Alam Posong. Posong dewasa ini menjadi tempat wisata alam yang populer di Kabupaten Temanggung dan cukup terkenal di wilayah Jawa Tengah dan DIY.

Adapun dalam pengelolaannya, Objek Wisata Alam Posong awal mulanya dikelola secara swadaya oleh masyarakat sekitar dan pemerintah desa setempat. Semakin bertambahnya jumlah pengunjung atau wisatawan, menjadikan Objek Wisata ini menarik minat investor untuk ikut andil dalam pengembangan objek wisata. Jadi menurut sumber dari pra penelitian penulis

dapat disimpulkan sementara, bahwa Objek Wisata Alam posong dikelola bersama antara masyarakat sekitar yang merupakan anggota dari kelompok sadar wisata (POKDARWIS), dari pihak swasta sebagai investor dan dari pihak pemerintah desa ada BUMDES sebagai mitra kerja dari masyarakat dan swasta. Pengelolaan objek wisata tersebut tidak terlepas dari peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata(DisBudPora) Kabupaten Temanggung yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata dan mempunyai tugas atau peran menyelenggarakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian di Obyek Wisata Alam Posong.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **a. Teori Kolaborasi**

*Collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung stekholder di luar negara, berorientasi konsensus, dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell & Gash, 2007, dalam Setyoko 2011: 15)(Sufianti et al. 2013)

Menurut Anshell dan Gash (2008) Proses Kolaboratif terdiri dari berbagai tahapan yaitu dimulai adanya :

#### **1) Dialog secara tatap muka (*face-to-face dialogue*)**

Adanya forum bersama sehingga para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait mampu menyampaikan kegiatan maupun kendala-kendala yang dihadapi dalam kolaborasi. Dengan diadakan dialog secara tatap muka maka dapat meminimalisir atau tidak menimbulkan tumpang tindih kepentingan. Contoh kegiatan secara *Face to face* adalah pelatihan dan sosialisasi.

#### **2) Membangun kepercayaan (*trust building*)**

Timbulnya inovasi *collaborative governance* salah satunya disebabkan oleh kurangnya kepercayaan diantara para *stakeholders*. Adapun prinsip dalam membangun kepercayaan :

- a. Rasa saling percaya didasarkan pada hubungan profesionalisme atau hubungan sosial.
- b. Keyakinan bahwa para aktor mempercayakan pada informasi-informasi atau usaha-usaha aktor lainnya dalam suatu jaringan, untuk mencapai tujuan bersama.

Maka dalam penelitian ini, pemerintah mempercayakan informasi-informasi atau usah-usaha aktor lainnya, yaitu swasta dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Oleh sebab itu untuk melanggengkan kepercayaan, maka dibutuhkan komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan.

### **3) Membangun komitmen terhadap proses (*commitment to the process*)**

Komitmen diantara *stakeholders* merupakan hal penentu terhadap berhasil tidaknya proses *collaborative governance*. Dengan komitmen maka akan menimbulkan keyakinan bahwa dengan *collaborative process* akan menciptakan keuntungan untuk masing-masing pihak dan kepentingan publik.

Komitmen untuk berproses memiliki arti mengembangkan keyakinan bahwa perundingan adalah cara yang terbaik. Dengan adanya perundingan maka kebijakan yang diinginkan akan tercapai. Prosedur yang jelas, adil, dan transparan sangat penting untuk komitmen.

### **4) Berbagi pemahaman (*shared understanding*)**

Dalam berkolaborasi para *stakeholders* harus menyamakan pemahaman atau persepsi akan tujuan yang dapat mereka capai secara bersama. *Shared understanding* merupakan penyamaan persepsi tentang pengetahuan atau pemahaman yang diperlukan untuk mengatasi masalah.

### **5) Hasil sementara (*intermediate outcome*)**

Kolaborasi akan sangat mungkin terjadi ketika tujuan dan keuntungan dari proses kolaborasi terlihat hasilnya. Dari hasil proses kolaborasi tersebut diartikan dapat membangun momentum yang dapat menyebabkan keberhasilan kolaborasi. Keberhasilan ini akan memberikan *feedback* ke dalam proses kolaboratif, mendorong siklus

yang baik untuk membangun kepercayaan dan komitmen.(Tresiana 2017)

#### **b. Teori Pariwisata**

Menurut Hari Karyono (1997:15) memberikan definisi secara umum dan secara teknis mengenai pariwisata bahwa: Secara umum, definisi pariwisata adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usah dan masyarakat untuk mengatur mengurus dan melayani apa yang dibutuhkan wisatawan. Sedangkan definisi secara teknis ,bahwa pariwisata merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan manusia yang dilakukan perorangan maupun kelompok di tempat wisata yang berada di negara sendiri atau negara lain. Kegiatan tersebut menggunakan layanan jasa berupa kemudahan dan lain-lain yang diadakan atau dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat untuk dapat tercapainya keinginan wisatawan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Rahmawati Dian Eka (2014 : 13) penelitian kualitatif deskriptif merupakan sebuah penelitian yang bisa menghasilkan data yang bersifat deskriptif bisa berupa kata-kata ataupun tulisan dari seseorang terhadap suatu yang sedang diamati di lapangan. Dengan penjelasan seperti itu maka penelitian kualitatif deskriptif ditujukan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong serta Bagaimana Proses-proses kolaborasi yang terjadi dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong.

Menurut Moleng bahwa subjek penelitian adalah orang yang bisa dimanfaatkan dalam suatu penelitian untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi suatu penelitian. Adapun Subjek dalam penelitian ini adalah : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, Pemerintah Desa Tlahab Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, Pengelolaan Objek Wisata Alam Posong dan Masyarakat sekitar.

Unit Analisis data pada Penelitian ini adalah : 1 kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, 1 Kepala Desa Tlahab, 1 orang Kepala Dusun, 1 orang pemelik Taman Wisata Alam Posong, 1 orang perwakilan dari BUMDES, 1 orang perwakilan dari Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), 1 orang perwakilan dari masyarakat Desa Tlahab. Lokasi penelitian dari unit analisis ini akan dilakukan pada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, pada Kepala Desa Tlahab, Kepala Dusun, Pemilik Taman Wisata Alam Posong, Perwakilan BUMDES, Perwakilan Pokdarwis, Perwakilan dari Masyarakat Desa Tlahab di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yang telah ditetapkan didalam penelitian ini . Setelah itu melakukan dokumentasi, yaitu cara yang digunakan dalam pengumpulan data dengan menggunakan macam-macam dokumen atau catatan yang bisa menjelaskan keadaan konsep yang sedang diteliti, didalam unit analisis yang selanjutnya akan dijadikan menjadi objek penelitian dan melakukan observasi, yaitu cara pengumpulan data mengenai konsep penelitian di dalam unit analisis penelitian, yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung.

#### **IV. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Secara konseptual yang menjadi karakteristik utama dari Proses Kolaborasi atau *Collaborative Governance Process* meliputi dialog secara tatap muka ( *face to face* ), membangun kepercayaan ( *trust building* ), membangun komitmen terhadap proses ( *commitment to the process* ), berbagi pemahaman ( *shared understanding* ) dan kemudian terbentuknya hasil sementara ( *intermediate outcome*). Untuk memahami pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong dalam perspektif *Collaborative Governance*, maka perspektif tersebut perlu dijabarkan dan dipahami lebih mendalam agar nanti hasilnya dapat dikembangkan menjadi model yang aplikatif untuk pengelolaan Obyek Wisata Alam. Penjabaran perspektif tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dari berbagai responden atau informan. Pada bagian ini akan disajikan penjabaran dari hasil penelitiain di



lapangan, mengenai Kolaborasi Pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, dalam Perspektif *Collaborative Governance Process*.

#### **a. Dialog Secara Tatap Muka ( *Face To Face* )**

Dialog secara tatap muka ( *Face To Face* ) antara pemangku kepentingan ( *Stakeholders* ) merupakan hal yang sangat dasar dan penting dalam membangun *Collaborative Governance*. Karena dalam tahap dialog secara tatap muka ( *Face To Face* ) ini, sangat diperlukan oleh para pemangku kepentingan ( *stakeholder* ) untuk mencapai kesepakatan bersama atau konsensus dan mengidentifikasi peluang keuntungan bersama dalam berkolaborasi. Menurut (Anshell dan Gash) Dialog secara tatap muka ( *face to face*) adalah Adanya forum bersama sehingga para pemangku kepentingan ( *stakeholders*) yang terkait mampu menyampaikan kegiatan maupun kendala-kendala yang dihadapi dalam kolaborasi. Dialog secara tatap muka ( *Face to face* ) ini merupakan wadah atau sarana suatu kepercayaan dalam menyatukan program yang ditetapkan secara bersama antara *stakeholder*.

Dalam penelitian ini, yaitu tentang kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong, bahwa dalam tahap dialog secara tatap muka ( *face to face* ) yang dilakukan antar pemangku kepentingan berupa FGD ( *Forum Grup Discussion*).

Awal pembangunan Obyek Wisata Alam Posong merupakan hasil dari Forum diskusi yang melibatkan banyak pihak. Mulai dari pihak masyarakat yang tergabung dalam kelompok pecinta Alam Jogorekso, sebagai pihak yang pertama kali menemukan Posong, lalu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan menerima usulan dari Kelompok pecinta alam Jogorekso dan meneruskannya ke pimpinan, dan Tentunya Pemerintah Desa Tlahab yang saat itu merupakan partner masyarakat dalam menyampaikan aspirasi ke Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Adanya diskusi mengenai awal terbentuknya Posong, berangkat dari kesamaan pandangan antar anggota diskusi saat itu yaitu, dari pimpinan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung yang menginginkan Obyek Wisata baru dan ketika itu secara bersamaan ada usulan dari Kelompok Pecinta Alam Jogorekso Tlahap. Mengenai adanya tempat yang

menarik untuk dikembangkan, yaitu Posong, dan dari proses diskusi itulah Obyek Wisata Alam Posong terbentuk.

Setelah Obyek Wisata Alam Posong berdiri atau terbangun dan dibuka secara komersil ke publik. Seiring berjalannya waktu, banyak keluhan dari pengunjung bahkan masyarakat sekitar mengenai Obyek Wisata Alam Posong. Adapun bentuk keluhan dari masyarakat sekitar posong , mereka mengeluhkan bahwa Posong sudah cukup terkenal di dunia Pariwisata, namun sangatlah kecil lahannya dan hanya seluas 1000 m dan fasilitas juga kurang memadai. Kemudian karena banyaknya keluhan yang dirasakan oleh pengunjung maupun masyarakat , maka saat itu di tahun 2017, timbulah inisiatif dari pihak swasta meminta izin untuk perluasan dari Obyek Wisata Alam Posong.

Perluasan Taman Wisata Alam Posong, diawali dari proses tatap muka atau dialog secara tatap muka ( face to face ) antara Bapak H. Hariyanto selaku pihak swasta dengan Pemerintah desa. Proses tatap muka tersebut dilakukan untuk mendapat perijinan perluasan Obyek Wisata Alam Posong dari pihak Pemerintah Desa Tlahap. Tidak hanya itu, proses dialog secara tatap muka juga terjadi antara Bapak H. Hariyanto dengan Bapak H. Hasyim selaku Bupati Kabupaten Temanggung yang saat itu memberikan dukungan kepada Bapak H. Hariyanto untuk memperluas Obyek Wisata Alam Posong.

Menurut penelitian yang sudah dilakukan, adanya dialog secara tatap muka ( face to face ) ini merupakan suatu hal yang penting, sehingga setiap pemangku kepentingan dapat menyampaikan aspirasinya, untuk mencapai kesepakatan bersama. Seperti halnya Obyek Wisata Alam Posong dan Taman Wisata Alam Posong, kedua Obyek Wisata ini merupakan hasil dari adanya proses dialog secara tatap muka antara pemangku kepentingan. Maka dengan begitu tahap awal dari kolaborasi dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong sudah berjalan secara baik.

#### **b. Membangun Kepercayaan ( *Trust Building* )**

Menurut ( Anshel and Gash) Timbulnya inovasi *collaborative governance* salah satunya disebabkan oleh kurangnya kepercayaan diantara para *stakeholders*. Adapun prinsip dalam membangun kepercayaan :

1. Rasa saling percaya didasarkan pada hubungan profesionalisme atau hubungan sosial.

2. Keyakinan bahwa para aktor mempercayakan pada informasi-informasi atau usaha-usaha aktor lainnya dalam suatu jaringan, untuk mencapai tujuan bersama.

Maka dalam penelitian ini, pemerintah mempercayakan informasi-informasi atau usah-usaha aktor lainnya, yaitu swasta dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Oleh sebab itu untuk melanggengkan kepercayaan, maka dibutuhkan komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan.

Hubungan yang terjadi antara pemerintah dan swasta dalam membangun kepercayaan bersifat koordinasi, yaitu terlihat ketika Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung ikut serta dalam menyelesaikan masalah yang sempat terjadi di Obyek Wisata Alam Posong dan juga ikut andil dalam mempromosikan Obyek Wisata Alam Posong. Hal demikian terlihat juga Pemerintah Desa mengeluarkan kebijakan mengenai aturan pengembangan Obyek Wisata Alam Posong, bahwa pengembang harus merupakan masyarakat asli Desa Tlahap, dan itu terbukti bahwa pengembang Taman Wisata Alam Posong adalah Bapak H. Hariyanto yang merupakan masyarakat Desa Tlahap asli. Tidak hanya itu dalam membangun kepercayaan diantara stakeholder dalam pengelolaan Obyek Wisata Taman Posong, ada fenomena yang terjadi yang bersifat transaksional yang melibatkan pemilik Taman Wisata Alam Posong dengan Pemerintah Desa Tlahab, yaitu pemberian bagi hasil dari pihak swasta kepada pihak Pemerintah Desa sebesar 25 juta rupiah dan itu masih dilakukan hingga sekarang.

Proses kolaborasi yang terjadi dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong, bahwa setiap aktor sudah cukup baik dalam melakukan tugas dan kewajibannya dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong. Dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi dalam membangun kepercayaan adalah sudah adanya koordinasi yang cukup baik diantara stakeholder. Setiap aktor sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya dan porsinya, dan setiap aktor sudah menjalankan perjanjian sesuai kesepakatan di awal.

### **c. Komitmen Terhadap Proses (*Commitment to the process*)**

Menurut (Anshel and Gash), Komitmen Terhadap Proses (*Commitment to the process*) adalah Komitmen diantara *stakeholders* merupakan hal penentu terhadap berhasil tidaknya proses *collaborative governance*. Dengan

komitmen maka akan menimbulkan keyakinan bahwa dengan *collaborative process* akan menciptakan keuntungan untuk masing-masing pihak dan kepentingan publik.

Proses kolaborasi pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong dalam hal komitmen terhadap proses yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat memiliki tujuan yang sama, yaitu mensejahterkan Masyarakat Desa Tlahap dengan cara memberdayakannya, dengan mengikut sertakan mereka dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong. Dalam kerjasama antar *stakeholder* sudah berjalan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan kejelasan prosedur yang dikemukakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, bahwa mereka tidak ikut campur dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong.

Hal demikian juga dikemukakan oleh pihak Pemerintah Desa Tlahap, mereka sangat memberdayakan masyarakatnya, mulai ada yang jualan, tukang ojek dan penyedia jasa *homestay*. Pihak masyarakat dalam penuturannya juga merasa sangat diuntungkan dalam segi *financial*, karena mereka merasa dilibatkan dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong ini. Mereka, pihak masyarakat ada yang menjadi *guide*, tukang ojek, penjual makanan penyedia *home stay*, petani kopi dan hampir semua elemen masyarakat Desa Tlahap merasakan dampak positif dengan adanya kolaborasi ini. Jadi dengan prosedur yang jelas ini, maka dalam tahap komitmen menuju proses mengenai pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong, sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik dan akan terhindar dari tumpang tindih kepentingan.

#### **d. Kesepahaman Bersama (*Shared Understanding*)**

Menurut (Anshel and Gash) Berbagi pemahaman (*shared understanding*) adalah dalam berkolaborasi para *stakeholders* harus menyamakan pemahaman atau persepsi akan tujuan yang dapat mereka capai secara bersama. *Shared understanding* merupakan penyamaan persepsi tentang pengetahuan atau pemahaman yang diperlukan untuk mengatasi masalah.

Proses kesepahaman bersama dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong sudah berjalan cukup optimal. Hal demikian terlihat dari kepelatihan yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Temanggung dan diikuti oleh masyarakat Desa Tlahap, crew Taman Wisata Alam Posong mengenai pemandu wisata alam. Dengan diadakannya pelatihan seperti itu menjadikan masyarakat bertambah pengetahuannya dalam bidang kepariwisataan. Tidak menutup kemungkinan dalam acara pelatihan itu, akan terjadi transfer ilmu diantara peserta dengan pengisi acara tersebut.

Tidak hanya itu pihak Pemerintah Desa Juga sering mengadakan rapat , musyawarah dengan warga , dan dari forum tersebut maka aspirasi masyarakat dapat tertampung dan dapat segera dilaksanakan. Pihak swasta yang merupakan masyarakat Desa Tlahap, juga sering mengadakan pertemuan dengan BUMDES yang dilakukan sebulan sekali.

Adapun upaya kesepahaman bersama yang dilakukan oleh Swasta dengan Pemkab Kabupaten Temanggung yaitu adanya kunjungan dari dinas untuk mengevaluasi kekurangan Taman Wisata Alam Posong. Jadi dari fakta diatas, para pemangku kepentingan dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong, dalam proses kesepahaman bersamanya ( *shared understanding* ) sudah terbangun dengan baik.

#### **e. Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*)**

Menurut (Anshel and Gash) , tahap hasil sementara (*intermediate outcomes*) memiliki artian bahwa kolaborasi akan sangat mungkin terjadi ketika tujuan dan keuntungan dari proses kolaborasi terlihat hasilnya. Dari hasil proses kolaborasi tersebut diartikan dapat membangun momentum yang dapat menyebabkan keberhasilan kolaborasi. Keberhasilan ini akan memberikan *feedback* ke dalam proses kolaboratif, mendorong siklus yang baik untuk membangun kepercayaan dan komitmen

Dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong ini, bahwa tujuan dari kolaborasi ini adalah adanya keuntungan yang didapat dari para pemangku kepentingan dengan cara memberdayakan SDM asli Desa Tlahap sebagai salah satu *stakeholdernya*. Dari penuturan beberapa narasumber diatas, hasil capaian sementara adalah pendapatan Desa Tlahab, Swasta dan Masyarakat mengalami kenaikan yang signifikan, ada juga regulasi Desa yang dihasilkan, yaitu mengenai hanya Sumber Daya Manusia asli Desa Tlahap sajalah, yang boleh terlibat dalam pengelolaan obyek wisata alam posong. Tidak hanya itu setelah adanya kolaborasi diantara stakeholder dalam pengelolaan Obyek

Wisata Alam Posong, maka hasil fisik yang terbaru adalah akan di bangunnya TIC (Tourism Information Center) untuk wisata di Desa Tlahap, khususnya Posong.

Adannya sarana dan prasarana ini diharapkan mampu meningkatkan *efektivitas* kegiatan pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong, selain itu juga mampu mengurangi atau meminimalisir masalah teknis yang ada di kawasan Obyek Wisata Alam Posong. Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong saat ini juga telah tergabung dalam beberapa forum, seperti Forum Komunikasi Pengelolan Wisata Alam dan Himpunan Pramuwisata Indonesia. Kedua forum tersebut terbentuk atau hasil dari keterlibatan Dinas Kebudayaan dan Parwriwisata Kabupaten Temanggung dalam kontek pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong.

Dari fakta-fakta diatas maka dapat terlihat bahwa masing-masing stakeholder memiliki tupoksinya atau peranannya sendiri-sendiri. Sehingga untuk hasil sementara proses kolaborasi dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong, sudah berjalan dengan baik untuk mendorong terciptanya siklus , komitmen untuk terciptanya kolaborasi yang lebih baik lagi.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **a. KESIMPULAN**

Penelitian ini meneliti tentang kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong di Desa Tlahap, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. Dimana penelitian ini memfokuskan penelitiannya mengenai proses kolaborasi (*collaborative governance process*) yang meliputi : dialog secara tatap muka (*face to face*), membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses (*commitment to the process*), kesepahaman bersama (*shared understanding*) dan hasil sementara (*intermediate outcome*). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Dialog secara tatap muka (*face to face*) dalam pengelolaan obyek wisata Alam Posong sudah berjalan dengan baik. Proses dialog secara tatap muka ini merupakan unsur terpenting dalam berkolaborasi dan

hampir setiap unsur yang lainnya secara tidak langsung juga terjadi proses tatap muka.

- 2) Membangun kepercayaan (*trust building*) dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong sudah terlihat baik dengan adanya koordinasi antar *stakeholder*. Dalam tahap ini para aktor sudah menjalankan tugasnya sesuai porsinya, berdasarkan perjanjian diawal.
- 3) Komitmen terhadap proses (*commitment to the process*) dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong juga sudah berjalan dengan sangat baik. Hal itu terlihat dari komitmen yang ditunjukkan oleh para *stakeholder* , yang memiliki komitmen mengangkat perekonomian daerah setempat melalui cara memberdayakan masyarakat setempat.
- 4) Kesepahaman bersama (*shared understanding*) dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong juga ditunjukan sangat baik oleh para pemangku kepentingan. Hal itu terlihat dari pelatihan, sosialisai dan musyawarah yang dilakukan secara rutin oleh *stakeholder*.
- 5) Hasil sementara (*intermediate outcome*) dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong juga sudah terlihat hasilnya, yaitu forum yang menaungi masyarakat mengenai kepariwisataan, kenaikan pendapatan masyarakat dan para pemangku kepentingan dan adanya serana dan prasarana yang mendukung untuk pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong.

#### **b. SARAN**

- 1) Dibentuknya regulasi yang mengatur tentang adanya kolaborasi antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong, agar kerjasama yang dilakukan oleh ketiga pilar tersebut memiliki payung hukum yang jelas, selain itu juga untuk menghindari terjadinya tumpang tindih peran dalam pengelolaan.
- 2) Diharapkan adanya pelayanan berkelanjutan untuk wisatawan (mass tourism) untuk sampai ke puncak Posong, seperti angkutan dari parkir bawah ke atas untuk mengangkut para wisatawan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Zaenuri, Muchamad. 2018. *Tata Kelola Pariwisata-Bencana Berbasis Collaborative Governance Konsep, Analisis dan Pemodelan*. Yogyakarta : Explore.
- Hadiwiyono, Surya S. 2012. *PERENCANAAN PARIWISATA PERDESAAN BERBASIS MASYARAKAT (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Yoeti, Oka A. 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta : PT. Percetakan Penebar Swadaya.
- Adikampana, I. M. (2017). *PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT*. Bali: CAKRA PRESS.
- ZAENURI, M. (2012). *PERENCANAAN STRATEGIS KEPARIWISATAAN DAERAH Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: e-Gov Publishing.

### Jurnal:

- Zaenuri, Muchamad, Soesilo Zauhar, Andy Fefta Wijaya, and East Java. "TOURISM AFFAIR MANAGEMENT WITH COLLABORATIVE GOVERNANCE APPROACH: TOURISM AFFAIRS MANAGEMENT STUDIES IN SLEMAN REGENCY ,." 2(6): 1-14.
- Studi, Program et al. 2008. "PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANORAMA."———. 2016. "( Studi Kasus Di Desa Wisata Tlahab Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung )."
- Sufianti, Ely, Dewi Sawitri, Krishnai Nur Pribadi, and Tommy Firman. 2013. "Collaborative Process In Communicative-Based Planning Within Uncollaborative Society." *MIMBAR, The Journal of Social and Development* 29 (2): 133-44. <http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/390>.
- Haryono, Nanang. 2012. "Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik." *Th IV. Nomor 1*: 47-53. <http://journal.unair.ac.id/download->



[fullpapers-](#) admpd0fda03369full.pdf.

- Yuliani,s., &Rosyida,D.P.G. (2017). Kolaborasi dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. *Jurnal Wacana Publik, volume 1 No 2 2017*hlm 33-47.
- Tresiana, Novita. 2017. "( Collaborative Management Of The Teluk Kiluan Tourism )." : 77-84.
- Sopari, Hery, Ngakan Putu Oka, and Darmawan Salman. 2014. "MODEL KOLABORASI PERENCANAAN ANTARA BALAI TAMAN NASIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI SECARA LESTARI A Model of Planning Collaboration Between Wakatobi National Park Authority and Wakatobi Regency Government in Sustainable Natural Resource Managem." 14(2): 189-98.
- Dewi, T.D, (2012). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL (Studi Kasus Tentang Kerajinan Reyog dan Pertunjukan Reyog di Kabupaten Ponorogo). *Tesis, perpustakaan.uns.ac.id*.
- Kristian, Yudi. 2017. "Pengelolaan Objek Wisata Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat Di Danau Aco Kampung Linggang Melapeh, Kecamatan Linggang Bigung." 5: 5404-17.
- Purmada, Dimas Kurnia, Wilopo, and Luchman Hakim. 2016. "Pengelolaan Desa Wisata Dalam Perspektif Community Based Tourism (Studi Kasus Pada Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang)." *Jurnal Administrasi Bisnis* 32(2): 15-22.
- Nurmansyah, Agung. 2014. "Potensi Pariwisata Dalam Perekonomian Indonesia Agung Nurmansyah 1 1." III(1): 44-61.
- Rusita, Rahmat Walimbo, Yunita Sari, Melda Yanti. 2016. "Studi Potensi Objek Dan Daya Tarik Wisata Alam Air Terjun Wiyono Di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman, Provinsi Lampung." *Info Teknik* 17(2): 165-86.
- Certini, Giacomo et al. 2014. "Purposive Sampling." *Oikos* 2(6): 10-344.

Widyasti, F.R. 2013. STRATEGI PROMOSI WISATA PADA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG. *Skripsi*.

**Internet :**

Laman.temanggungkab.go.id(2017). Potensi pariwisata . diakses pada 10 Oktober 2019,dari <https://laman.temanggungkab.go.id/info/detail/4/53/pariwisata.html>

Kompasiana.com. (2018, 9 Desember). Menengok Kembali Pesona Posong dalam Perspektif Berkelanjutan. Diakses pada 10 Oktober 2019, dari <https://www.kompasiana.com/jnatan48/5c0c8da1aeebe14cf0433253/menengok-kembali-pesona-posong-dalam-perspektif-berkelanjutan?page=all>

Bernas.id. Indah dan Sejuknya Posong di Kaki Gunung Sindoro. Diakses pada 26 November 2019, dari <https://m.bernas/67195-indah-dan-sejuknya-posong-di-kaki-sindoro.html>, pada pukul 10.00

Bonvoyage.com. Wisata Posong : panorama golden sunrise, milky way, hingga 7 gunung. Diakses pada 25 november 2019, dari <https://bonvoyagejogja.com/wisata-posong-panorama-golden-sunrise-milky-way-hingga-7-gunung/>, pada pukul 21.00